
**PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA BINJAI
(STUDI KASUS PADA BPKPAD KOTA BINJAI)**

Muhammad Fahmi Reza^{1*}, Hendra Harmain², Juliana Nst³

^{1*} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: mfahmireza5@gmail.com

Masuk: September 2022	Penerimaan: September 2022	Publikasi: September 2022
-----------------------	----------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kota binjai (Studi kasus pada BPKPAD kota binjai). Metode yang Digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dan pendekatan asosiatif, Teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner serta sampel pada penelitian ini sebanyak 35 pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai menggunakan Teknik sampling jenuh. Analisis Data menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian pada hipotesis uji parsial (Uji t) dengan angka signifikan 5% dengan t_{tabel} sebesar (2,039) menunjukkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan hasil olah data bahwa t_{hitung} (2,796) > t_{tabel} (2,039). Dan menunjukkan juga bahwa variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan hasil olah data bahwa t_{hitung} (11,857) > t_{tabel} (2,039). Hasil uji hipotesis simultan menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan hasil olah data F_{hitung} (446,980) > F_{tabel} (2,90).

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan; Aksesibilitas Laporan Keuangan; Akuntabilitas; Kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the quality of financial reports and the accessibility of financial reports on performance accountability of government agencies in the city of binjai (Case study on BPKPAD binjai city). The method used in this study is the quantitative method and associative approach. The data collection technique uses a questionnaire and the sample in this study is 35 employees at the Regional Financial, Revenue and Asset Management Agency, Binjai City, using a saturated sampling technique. Data analysis using multiple linear regression method. The results of the research on the partial hypothesis test (t test) with a significant number of 5% with a ttable of (2.039) indicate that the Quality of Financial Reports variable

affects Government Agencies Performance Accountability with the results of data processing that $tcount (2.796) > ttable (2.039)$. And it also shows that the variable Accessibility of Financial Statements has no effect on Performance Accountability of Government Agencies with the results of data processing that $tcount (11.857) > ttable (2.039)$. The results of the simultaneous hypothesis test show that the quality of financial reports and the accessibility of financial reports simultaneously influence the performance accountability of government agencies with the results of data processing $Fcount (446.980) > Ftable (2.90)$.

Keywords: *Quality of Financial Reports; Accessibility of Financial Reports; Accountability Performance of Government Agencies*

A. PENDAHULUAN

Untuk mencapai pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka diperlukan adanya tata cara pelaksanaan akuntabilitas yang efisien. Hal ini dapat merubah tatanan pemerintahan yang masih belum maksimal menjadi lebih baik secara demokratis. Pemerintah yang mengupayakan mewujudkan kinerja yang akuntabel akan mendapat dukungan dari masyarakat dikarenakan ada rasa percaya terhadap apa yang sudah pemerintah selenggarakan, rencanakan, dan pelaksanaan yang memprioritaskan kesejahteraan publik. Akuntabilitas juga bentuk komitmen pemerintah yang akan terus melayani publik.

Pemerintah daerah saat ini masih menjadi perhatian publik karena kinerja pemerintah daerah masih belum memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat. Namun konsep Otonomi daerah yang terwujud, mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat supaya pemerintah mempunyai penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang baik (Ridzal, 2020).

Wajib bagi Pemerintah Pusat/Daerah/Kota dalam menyampaikan laporannya dan menerapkan sistem akuntabilitas untuk mencapai hasil yang baik berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tersebut langsung ditanggung jawabi oleh pejabat fungsional dalam penyelenggaraan pelayanan fungsi administrasi. Pimpinan dan bersama tim kerjanya harus menyampaikan dan menjelaskan dalam mempertanggung jawabkan suatu keberhasilan/kegagalan pada tingkat pencapaian kinerja pemerintah (Herawaty, 2019).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga disebut sebagai bentuk media dalam melaporkan suatu keberhasilan/kegagalan pada instansi pemerintah terhadap

tujuan dan sasaran organisasi. Dasar akuntabilitas kinerja terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 membahas tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang setiap instansi pemerintah wajib untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja di kota masing-masing sebagai bentuk mempertanggungjawabkan dalam pencapaian suatu tujuan organisasi sesuai tupoksi dalam bentuk LAKIP (Zulfiandri, 2017).

Untuk menyusun laporan keuangan pemerintah, laporan tersebut harus disajikan dengan benar-benar yang mampu memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan. Mengacu pada indikator karakteristik laporan keuangan terdapat pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual yang membahas tentang karakteristik yang menjadi persyaratan *normative* yang dibutuhkan agar kualitas laporan keuangan memenuhi syarat yang di kehendaki. Adapun karakteristik tersebut ialah relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Tidak hanya kualitas laporan keuangan saja yang bisa mewujudkan transparansi suatu akuntabilitas kinerja pemerintah, namun suatu laporan yang di publikasikan ke media yang biasa disebut aksesibilitas. Mempublikasikan laporan keuangan yang dilakukan instansi pemerintah saat ini masih belum menjadi hal yang umum, laporan keuangan pemerintah yang tidak tersedia dan aksesibel di media akan menjadi penurunan terhadap kualitas dari transparansi akuntabilitas kinerja pemerintah yang mana para pengguna potensial tidak dapat mengakses dan menilai. Dalam mencapai tujuan kepastian terhadap transparansi laporan keuangan maka perlunya memperhatikan pada indikator dalam penilaian apakah laporan pertanggungjawaban pemerintah sudah aksesibel atau belum. Adapun indikator dalam penilaian aksesibilitas laporan keuangan yaitu dapat diakses dan dipublikasi melalui media.

Mengacu pada permendagri nomor 3 tahun 2017 membahas tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi yang tujuannya untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang *goodgovernance* yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria yang dapat menentukan akuntabilitas keuangan pemerintah yang baik adalah bentuk dari kemampuan pemerintah dalam memberikan aksesibilitas dan pengungkapan kepada stakeholder (Evicahyani & Nyoman Djinar Setiawina, 2015).

Mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 bahwa peraturan tersebut menjelaskan laporan pertanggungjawaban pemerintah harus di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kepada pihak legislatif sesuai wewenangnya. Maksud dari pemeriksaan oleh BPK ialah dengan memberikan pendapat berupa hasil opini sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan Negara. Untuk mencapai tujuan kualitas laporan yang dikehendaki maka laporan tersebut haruslah memenuhi syarat karakteristik laporan keuangan secara *normative*. Sangat penting jika laporan keuangan memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan agar menjadi bukti tanggung jawab atas penggunaan anggaran dari pemerintah pusat. Setelah adanya pemberian hasil Opini dari BPK selanjutnya BPK menerbitkan laporan hasil pemeriksaan serta Pemerintah daerah juga menerbitkan LAKIP, hal ini akan mewujudkan harapan publik atas akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik.

Ada 4 jenis-jenis opini berdasarkan pada peraturan UU No. 15 Tahun 2004, keempat jenis opini ini akan diberikan BPK kepada setiap instansi pemerintah yang merupakan hasil dari pemeriksaan laporan kinerja yang telah diserahkan kepada BPK. Berikut keempat jenis-jenis opini tersebut ialah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP) dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini/Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Tabel 1.
Daftar Hasil Opini Kota Binjai Tahun 2014-2020

Kota	Hasil Opini						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Binjai	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: *bpk.go.id*

Berdasarkan tabel 1.1 Kota Binjai mendapat WDP di tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2014 pemerintahan Kota Binjai mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian yang artinya LPKD Kota Binjai memiliki kualitas laporan keuangan yang baik. Namun pada tahun 2015 dan 2016 pemerintahan Kota Binjai mendapat opini WDP dari BPK dikarenakan masih terdapat akun yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Binjai masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja yang dimiliki oleh SKPD yang ada di

Kota Binjai. Kemudian pada tahun 2017 sampai dengan 2020 Pemerintah Kota Binjai mendapat opini WTP dari BPK yang artinya hal ini Laporan Kinerja Pemerintah Kota Binjai mengalami kenaikan dan mendapat hasil yang baik dan berkualitas.

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan dengan cara wawancara tidak terstruktur kepada salah satu pegawai BPKPAD di Kota Binjai, Hasil wawancara yang penulis lakukan adalah BPKPAD baru menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada tahun 2015 sehingga hasil opini pada 2015 dan 2016 Pemerintah Kota Binjai mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dikarenakan masih banyak SKPD yang belum siap dengan perubahan peraturan standar pemerintah berbasis akrual tersebut.

Kemudian peneliti juga tidak melihat adanya Laporan Keuangan yang dipublikasikan di media resmi instansi. Hal ini membuat secara Kinerja tidak memenuhi syarat akuntabilitas suatu pemerintah, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pemerintah masih belum memaksimalkan digital publikasi. Padahal dalam permendagri nomor 3 tahun 2017 dijelaskan demi mencapai tujuan pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance*) maka pemerintah harus mengupayakan dan mewujudkan pelaksanaan akuntabilitas secara transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya pemerintah yang memberikan aksesibilitas dan pengungkapan kepada *stakeholder*.

Melihat fenomena diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk tahun 2015 dan 2016 mendapat hasil opini WDP, hal ini menjadi catatan bahwa Kota Binjai pernah mengalami penurunan Akuntabilitas Kinerjanya, hal ini juga dibuktikan dari hasil wawancara tidak terstruktur bahwa masih belum maksimalnya perubahan pada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sehingga terdapat akun yang tidak sesuai. Kemudian ditahun 2021 untuk hasil laporan kinerjanya juga mengalami keterlambatan waktu dalam penyerahan dan mempublikasikannya. Mengingat dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan transparan maka laporan keuangan yang dihasilkan harus berkualitas, dengan selalu konsisten merepakkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan tetap mempublikasi laporan kinerja pemerintah.

B. KAJIAN LITERATUR

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan itu ialah disebut hubungan antara agen dengan principal dalam sebuah kontrak, dilihat dengan pendelegasian pada beberapa wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen. Dalam rangka mempertanggung jawabkan keuntungan para pemilik (*Principal*) maka agen manajer secara moral harus memaksimalkan kinerjanya dan mementingkan keuntungan para pemilik (*Principal*), hal ini membuat keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik pada suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi. Artinya ialah pemerintah pusat memberi tanggung jawab kepada pemerintah daerah, namun pemerintah daerah harus bias mempertanggung jawabkan tugas yang diberikan pemerintah pusat dan juga harus memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi

Menurut J.B. Ghartery, Akuntabilitas bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sering di pertanyakan tentang pelayanan apa, siapa, kepada siapa, kepemilikan apa dan bagaimana. Ledvina V. Carino, mengatakan Akuntabilitas adalah evolusi tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik di dalam yurisdiksinya maupun di luar tanggung jawab dan yurisdiksinya (Syhah, 2014).

Menurut LAN (2003:3), kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian penerapan suatu kegiatan/kebijakan dalam mencapai tujuan, maksud, dan visi organisasi. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kinerja merupakan proses umpan balik terhadap kinerja sebelumnya, yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang melalui proses yang berkesinambungan (Darwanis & Chairunnisa, 2013)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggung jawab instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tujuan organisasi untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara berkala. Pengertian Akuntabilitas Instruksi Presiden no. 7 Tahun 1999 mendefinisikan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Rio, 2019).

3. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan bagian integral dalam membangun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, dalam

pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, dibutuhkan adanya tuntutan yang lebih besar atas informasi yang sampai ke publik agar memiliki gambaran tentang pengelolaan sektor publik (Nur Lazimatul Hilma Sholehah, 2019)

4. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas dari sudut pandang tata ruang, aksesibilitas mengacu pada kemudahan seseorang atau kendaraan dapat melakukan perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain dengan aman, nyaman, dan tepat waktu. Kemudahan seseorang menerima informasi laporan keuangan disebut sebagai aksesibilitas. Pemerintah harus membuat laporan keuangannya tersedia secara luas bagi para pemangku kepentingan, seperti dengan menerbitkan laporan keuangan daerah di surat kabar, di Internet, atau melalui cara lain (Purwaningrum, 2018).

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Penelitian ini dilaksanakan pada April 2022 sampai September 2022. Populasi dalam penelitian ini ialah pegawai BPKPAD Kota Binjai dan sampel yang digunakan berjumlah 35 pegawai. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, sumber data yang digunakan ialah data primer dan pengumpulan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS (*Statistical Program For Special Science*).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum BPKPAD Kota Binjai

Sejarah singkat Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Salah satu kota (sebelumnya merupakan kotamadya tingkat II) di provinsi Sumatera Utara Indonesia adalah Kota Binjai. Binjai terletak 22 kilometer sebelah barat Medan, ibukota provinsi Sumatera Utara. Sejarah Berdirinya Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Binjai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2011 Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Binjai merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah yang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang melapor kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Mengingat kantor Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai direlokasi sekitar dua tahun lalu dan langsung diresmikan oleh wakil walikota. Lokasi kantor baru di Jalan Jambi, Desa Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan. Sebelumnya, Dispenda Kota Binjai menempati gedung milik Pemprov di Jalan Teuku Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara. Sebagaimana ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai, Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis di dalam wilayah tanggung jawabnya. Dan dengan berdasarkan kepada Undang-undang no. 10 Tahun 1948, atas usul Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan suratnya tanggal 16 Februari 1973 No. 4585/25 DPRD tingkat I Sumatera Utara dengan keputusan tanggal 13 Agustus 1973 No. 19/K/1973 telah menetapkan bahwa hari jadi provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah tanggal 15 April 1948 yaitu tanggal ditetapkannya UU No. 19 Tahun 1948 tersebut.

2. Hasil Penelitian

a. Uji Validitas

Jawaban kuesioner pada penelitian ini akan lebih dahulu di uji validitasnya sebelum digunakan untuk sebagai alat pengumpul data statistik. Uji ini dilakukan dengan membandingkan r hitung (*Pearson Correlation*) dengan r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel dengan nilai signifikan sebesar 0,05 maka suatu pernyataan tersebut dapat dikatakan valid. Kebalikannya, jika nilai r hitung $<$ r tabel maka suatu pernyataan dalam kuesioner untuk variabel tersebut dinyatakan tidak valid.

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (X1)

Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel (Tarf Sig. 5%)	Keterangan
1	0,776	0,324	Valid
2	0,877	0,324	Valid
3	0,891	0,324	Valid
4	0,911	0,324	Valid
5	0,779	0,324	Valid

Tabel 3.
Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig. 5%)	Keterangan
1	0,888	0,324	Valid
2	0,897	0,324	Valid
3	0,868	0,324	Valid

Tabel 4.
Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig. 5%)	Keterangan
1	0,850	0,324	Valid
2	0,967	0,324	Valid
3	0,887	0,324	Valid
4	0,873	0,324	Valid
5	0,836	0,324	Valid

Berdasarkan hasil tabel 1,2 dan 3 diatas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang peneliti ajukan telah dinyatakan valid. Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap butir pernyataan dapat digunakan jika r hitung > r tabel dengan nilai signifikansi sebesar 5% (0,05) sehingga syarat validitas dapat terpenuhi

b. Uji Reliabilitas

Setelah uji validitas maka selanjutnya adalah uji reliabilitas. butir pernyataan pada penelitian ini dapat dikatakan reliabel jika jawaban dari responden selalu konsisten/stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *Cronbach's Alpha*. Jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 maka variabel-variabel pada peneltiaan ini dapat dikatakan reliabel.

Tabel 5.
Tabel Hasil Uji Reliabilitas

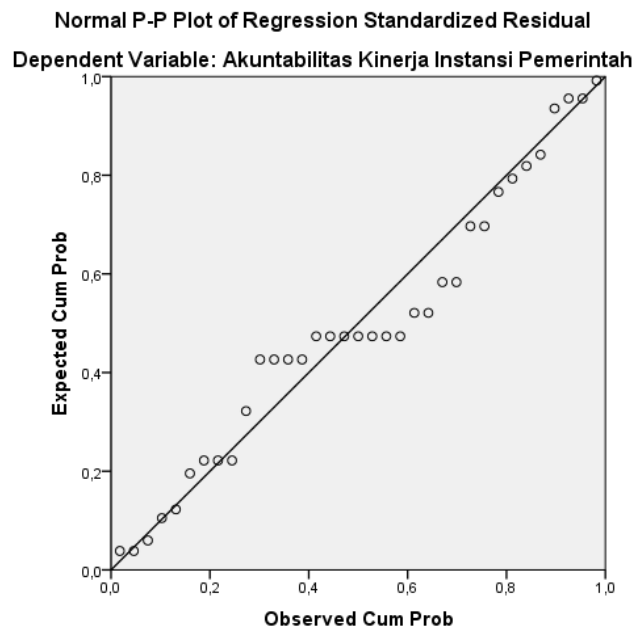
Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan (X1)	0,904	0,60	Reliabel

Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	0,861	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,929	0,60	Reliabel

Berdasarkan pada tabel 4.9 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua pernyataan pada setiap variabel dinyatakan reliabel karena hasil uji diatas nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60.

c. Uji Normalitas

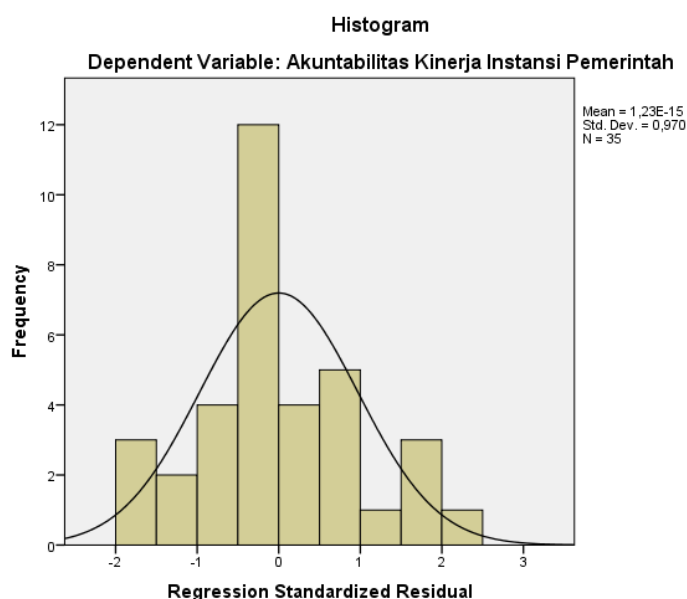
Uji normalitas pada penelitian ini untuk melihat kegunaan nilai residual yang dihasilkan apakah terdistribusi normal atau tidak. Model regresi dapat dikatakan baik jika nilai residual yang dihasilkan berdistribusi normal. Ada beberapa metode uji normalitas yang digunakan ialah dengan melihat penyebaran data pada grafik normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual* atau dengan uji *One Sample Kolmogrov Smirnov*. Jika nilai residual lebih besar dari 0,05 maka distribusi data dikatakan normal.



Gambar 1.
Hasil Uji Normalitas *P-Plot*

Berdasarkan pada gambar 1 diatas memperlihatkan titik-titik pola menyebar disekitar diagonal dan mengikuti diagonal tersebut. Maka pada

hasil grafik *P-Plot* daat penelitian ini adalah terdistribusi normal dan memenuhi model regresi yang baik.



Gambar 2.
Hasil Uji Normalitas Berupa Diagram Histogram:
Dependen Variabel : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Uji normalitas dengan histogram pada gambar 4.3 diatas ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel terdistribusi normal karena dapat kita lihat bahwa kurva histogram pada gambar tersebut membentuk parabola dan bukan garis linier.

Kemudian langkah selanjutnya pengujian menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov*. Jika nilai *asymptotic significant (2-tailed)* > 0,05 maka dapat dikatakan data sudah terdistribusi normal. Berikut adalah tabel hasil uji normalitas menggunakan perhitungan *Kolomgrov-Smirnov* menggunakan *Software SPSS* dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 6.
 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,49006994
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,139
	Positive	,135
	Negative	-,139
Test Statistic		,139
Asymp. Sig. (2-tailed)		,087 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel 4.10 diatas nilai *asymptotic significant (2 – tailed)* lebih besar dari 0,05 (5%) maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah berdistribusi normal.

d. Uji Multikolinearitas

Hubungan linear antar variabel bebas disebut dengan Multikolinearitas. Dalam praktiknya, umumnya multikolinearitas tidak dapat dihindari. Dalam artian sulit menemukan dua variabel bebas yang secara matematis tidak berkorelasi (korelasi = 0) sekalipun secara substansi tidak berkorelasi. Secara umum, bila terjadi kolinearitas sempurna atau terjadi korelasi yang tinggi antar variabel bebas akan menyebabkan nilai determinan dari matriks $x'x$ akan mendekati 0 (akan sama dengan 0 jika korelasi sempurna), maka koefisien regresi tidak dapat diperoleh dikarenakan $(x'x)^{-1}$ tidak dapat dicari. Satu hal yang perlu ditekankan kembali disini bahwa multikolinearitas merupakan hubungan linear.

Tabel 6.
 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

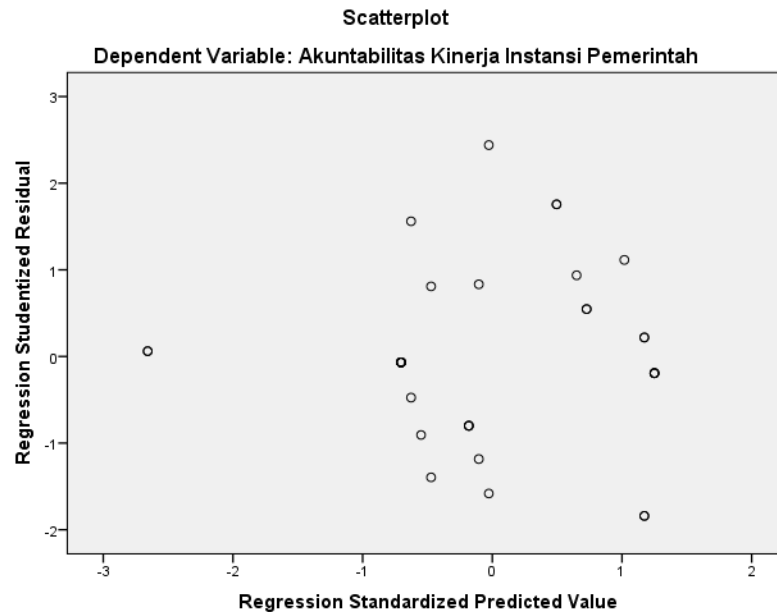
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kualitas Laporan Keuangan	,231	4,328
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	,231	4,328

- a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan $4,328 < 10$ dan Aksesibilitas Laporan Keuangan sebesar $4,328 < 10$. Dan untuk nilai *tolerance* Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,231 dan Aksesibilitas Laporan Keuangan sebesar 0,231 lebih besar dari 0,1. Hal ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat adanya multikolinieritas.

e. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamat lain. Regresi yang baik harusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Jika titik-titik *scatter plot* membentuk pola-pola tertentu, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Namun jika titik-titik menyebar di atas dan maka titik terdapat heteroskedastisitas.



Gambar 3.
Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatter Plot*

Gambar 2 di atas menunjukkan terdapat pola titik-titik pada grafik *scatter plot* yang menyebar acak dan tidak terlihat pola yang membentuk dengan pola yang jelas serta dapat dilihat menyebar baik dari atas maupun

dibawah titik nol pada sumbu Y. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadinya heteroskedastisitas dan layak di gunakan untuk memprediksi kualitas penyerapan laporan.

f. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda pada pengujian berikut ini menggunakan aplikasi *software* SPSS. Adapun hasil pengujian yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 7.
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,207	,764		-,271	,788
Kualitas Laporan Keuangan	,200	,071	,191	2,796	,009
Aksesibilitas Laporan Keuangan	1,354	,114	,811	11,857	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil tabel 6 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai koefisien dapat disusun dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Maka : AK} = -0,207 + 0,200\text{KL} + 1,354\text{AL}$$

Dari hasil perhitungan persamaan diatas dapat dijabarkan bahwa :

- 1) Nilai *constant* (a) = -0,207 artinya apabila skor variabel Kualitas Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan sama dengan nol, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah naik sebesar - 0,207.
- 2) Ketika variabel Kualitas Laporan Keuangan (X1) ditingkatkan sebesar 1%, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meningkat sebesar 0,200 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.
- 3) Ketika variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) ditingkatkan sebesar 1%, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan meningkat sebesar 1,354 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.

g. Uji t (Uji Parsial)

Uji t (Uji Parsial) pada penelitian ini digunakan untuk melihat adanya pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen dengan melihat pada nilai koefisien regresi. Jika koefisien regresi bernilai positif maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Nilai t_{tabel} untuk diuji pada taraf sig. $\alpha = 0,050$. Nilai t_{tabel} pada penelitian ini adalah sebesar 2,042, tabel distribusi t di cari $0,05 : 2 = 0.025$ (*two-tailed*) dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ ($df = 35-2-1 = 30$), n (jumlah data) dan k (jumlah variabel bebas). Penelitian ini menggunakan uji *two-tailed* (dua sisi) nilai sig. 0,050 yang digunakan untuk membandingkan jika t_{hitung} bernilai positif. Maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,042. Berikut ini adalah asil uji t :

Tabel 8.
 Hasil Uji t
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,207	,764		-,271	,788
Kualitas Laporan Keuangan	,200	,071	,191	2,796	,009
Aksesibilitas Laporan Keuangan	1,354	,114	,811	11,857	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- 1) Diketahui variabel Kualitas Laporan Keuangan (X1) pada tabel 4.13 diatas dapat diuraikan bahwa :
 $t_{hitung} (2,796) > t_{tabel} (2,042)$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,050$ maka kesimpulannya adalah variabel Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini dibuktikan dengan adanya H_0 diterima dan H_01 ditolak.
- 2) Diketahui variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) pada tabel 4.13 diatas dapat diuraikan bahwa :
 $t_{hitung} (11,857) > t_{tabel} (2,042)$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,050$ maka kesimpulannya adalah variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini dibuktikan dengan adanya H_0 diterima dan H_1 ditolak.

h. Uji F (Simultan)

Uji F atau uji simultan adalah kemampuan pengujian statistik untuk menunjukkan apakah koefisien regresi seluruh variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Uji F digunakan agar mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara keseluruhan atau simultan terhadap variabel terikat. Dengan nilai tingkat simultan untuk signifikansi sebesar 0,05 (5%). Nilai F_{tabel} untuk diuji pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Dan cara menentukannya sebagai berikut, F_{tabel} yaitu $df(n_1) = k-1$ atau $4-1 = 3$. Dan $df(n_2) = n-k$ atau $35-3 = 32$. Maka dapat diperoleh F_{tabel} sebesar 3,29

Tabel 9.
Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	228,120	2	114,060	446,980	,000 ^b
Residual	8,166	32	,255		
Total	236,286	34			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sig. 0,000 dan nilai F_{hitung} 446,980. Untuk pengambilan keputusan signifikan pada uji F ialah apabila nilai signifikan $< 5\%$ maka dinyatakan signifikan dan berpengaruh secara simultan. Maka dapat disimpulkan pada tabel diatas bahwa nilai signifikan $0,000 < 5\%$ maka hal ini dikatakan signifikan. Artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak yang menjelaskan bahwa seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk nilai F_{hitung} dalam persamaan ini sebesar 446,980. adapun untuk nilai F_{tabel} sebesar 3,29 maka F_{hitung} (446,980) lebih besar dari pada F_{tabel} (3,29) sehingga keputusan H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari variabel Kualitas Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

I. Uji Koefisien Determinan (R²)

Uji deterministik dilakukan untuk menjelaskan keakuratan suatu model atau untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan perubahan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R² yang dekat dengan variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memperkirakan variasi terikat. Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan dari studi yang diperoleh dari output SPSS diberikan di bawah ini.

Tabel 10.
Hasil Uji R²
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,983 ^a	,965	,963	,505

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil tabel 4.15 diatas memperlihatkan bahwa nilai Adjusted R *Square* sebesar 0,963. Dapat disimpulkan variabel bebas yakni kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan mampu menjelaskan variabel terikat yakni akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai 96,3% dan sisanya 3,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi penelitian ini.

3. Hasil Pembahasan

a. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa pada uji hipotesis (uji t) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,796 dengan signifikansi sebesar 5%, nilai t_{tabel} pada jumlah data sebanyak 35 (n) dengan variabel independen dan dependen (k) sebanyak 3 dengan taraf signifikansi 5% dan diperoleh dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,042. Kemudian dalam pengambilan keputusan apakah variabel itu dinyatakan berpengaruh apabila $t_{hitung} >$ dari pada t_{tabel} . Pada hasil pengujian dalam penelitian ini diperoleh t_{hitung} pada variabel X₁ (2,796) > t_{tabel} (2,042) maka kesimpulannya adalah Ha1 diterima dan Ho1 ditolak, artinya variabel Kualitas

Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan baik jika adanya tingkat Kualitas Laporan Keuangan yang memenuhi syarat normatif/karakteristik kualitas laporan keuangan sesuai pada peraturan yang berlaku. Oleh karena itu diharapkan bagi para penyusun laporan keuangan dapat mengikuti dan mematuhi peraturan yang ada demi mencapai hasil yang diharapkan.

b. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa pada uji hipotesis (uji t) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -0,204 dengan signifikansi sebesar 5%, nilai t_{tabel} pada jumlah data sebanyak 35 (n) dengan variabel independen dan dependen (k) sebanyak 3 dengan taraf signifikansi 5% dan diperoleh dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,039. Kemudian dalam pengambilan keputusan apakah variabel itu dinyatakan berpengaruh apabila $t_{hitung} >$ dari pada t_{tabel} . Pada hasil pengujian dalam penelitian ini diperoleh t_{hitung} pada variabel X_2 (11,857) $<$ t_{tabel} (2,042) maka kesimpulannya adalah H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak, artinya variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Adanya Aksesibilitas Laporan Keuangan yang terbuka dan transparan, maka akan mempermudah publik dalam mengakses sehingga kinerja pemerintah dikatakan baik dan transparan dari segi Aksesibilitasnya.

c. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa pada uji simultan (uji f) menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 446,980 dengan signifikansi sebesar 5%, nilai F_{tabel} pada jumlah data sebanyak 35 (n) dengan variabel independen (k) sebanyak 2 dengan taraf signifikansi 5% dan diperoleh dengan nilai F_{tabel} sebesar 2,90. Kemudian dalam pengambilan keputusan apakah seluruh variabel independen itu dinyatakan berpengaruh secara simultan apabila $F_{hitung} >$ dari pada F_{tabel} . Pada hasil pengujian dalam penelitian ini diperoleh F_{hitung} (446,980) $>$ t_{tabel} (2,90) maka kesimpulannya adalah H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak, artinya seluruh variabel independen yang terdiri dari Kualitas Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan

Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan adanya kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kinerja pemerintah khususnya pada pengelolaan keuangan pemerintah untuk mendukung meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Kualitas Laporan keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

REFERENSI

- Darwanis, & Chairunnisa, S. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah % Riset Akuntansi*, 6(2), 150–174.
- Evicahyani, S. I., & Nyoman Djinar Setiawina. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Unud*, 3(1).
- Herawaty, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56. <https://doi.org/10.36448/jak.v10i1.1209>
- Nur Lazimatul hilma Sholehah. (2019). Analisis akuntabilitas kinerja anggaran dengan perspektif amanah dalam mencegah fraud pada dkad provinsi gorontalo. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 217–228.
- Purwaningrum, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponogoro. In *Skripsi Muammadiya Ponorogo*.
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87–97. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i1.135>

- Rio, P. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 433.
- Syhah, B. A. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Sektor Publik. In *Artikel Universitas Muammdiyah Makassar*.
- Zulfiandri, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada OPD di Pemerintah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 2(1), 111.